Simulasi Jelang Muktamar Muhammadiyah-Aisyiah

SOLO (KR) - Meski sudah puluhan kali mengadakan muktamar, Panitia Muktamar ke-48 Muhammadiyah-Aisyiyah kembali menggelar simulasi pemilihan, persidangan dan serah terima mandat di Edutorium KH Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Sabtu (29/10). Simulasi dihadiri Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad dan Marpuji Ali, Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto, dan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jateng Tafsir. Simulasi diikuti perwakilan PDM dan PDA se-Jateng.

Anggota Panitia Pemilihan (Panlih) Muktamar ke-48 Muhammadiyah Budi Setiawan menegaskan, pemilihan dalam muktamar akan berbeda dari biasanya. "Biasanya pemilihan masih manual dan penghitungan yang sudah digitalize. Kali ini akan menggunakan proses e-voting sejak pemilihan hingga penghitungan raihan suara," jelas Budi Setiawan.

Sekretaris Panitia Pusat M Nurul Yamien menuturkan bahwa kegiatan ini diikuti perwakilan dari seluruh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan PD Aisyiyah se-Jateng. Ini lebih banyak jika dibandingkan simulasi yang pertama, yang hanya diikuti perwakilan dari Muhammadiyah dan Aisyiyah Solo Raya. "Perbedaan simulasi kedua dibanding dengan simulasi yang pertama, simulasi kedua ini lebih komprehensif, artinya mencoba mensimulasikan layanan kepada anggota muktamar sejak mereka datang ke kampus UMS ini." Ungkapnya.

Yemien menambahkan, bahwa selain simulasi pemilihan pada kesempatan ini juga dilakukan simulasi untuk tukar mandat dan simulasi pemondokan atau penginapan para peserta Muktamar ke-48 Muhammadiyah-Aisyiyah di Surakarta. Mengingat peserta muktamar nanti tidak sedikit, dia berharap dengan simulasi ini nanti akan memudahkan urusan pemondokan.

"Nah setelah simulasi pemondokan atau penginapan dilanjutkan simulasi persidangan, sehingga bisa diantisipasi oleh panitia hal-hal yang menyangkut persiapan persidangan. Seperti yang sekarang ini sedang berlangsung," ungkap Yamien. **(Fsy)**

KR-Istimewa

Simulasi diawali dengan pengalungan ID Card untuk Ketum PP Muhammadiyah sebagai peserta muktamar.

TERAPKAN GOOD MANUFACTURING PRACTICE

Polines Bantu Industri Rumah Tangga di Wonosobo

SEMARANG (KR) - Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Semarang (Polines) yang terdiri dari Ragil Tri Indrawati ST MT (Dosen Jurusan Teknik Mesin, Ketua Tim) dengan 2 anggota Farika Tono Putri ST MT dan Bayu Setyo Nugroho SST MM serta dibantu oleh 3 orang mahasiswa sebagai wujud penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melaksanakan pengabdian masyarakat di Wonosobo.

Pendampingan berupa penerapan Good Manufacturing Practice (GMP) meliputi penerapan teknologi tepat guna (TTG), pembuatan ruang produksi dan penerapan alat produksi yang sesuai dengan standar keamanan pangan serta penerapan public awareness meliputi pembuatan media pemasaran online dan pembuatan branding product berupa logo dan kemasan pada Usaha Industri Rumah Tangga (IRT) Krecek Salome yang dirintis oleh Misyanto di Desa Ngadikerso Kabupaten Wonosobo.

"Usaha IRT ini memproduksi krecek Salome atau yang dikenal dengan renggi-nang singkong sebagai makanan khas Kabupaten Wonosobo. Langkah ini sebagai upaya untuk membantu meningkatkan produktivitas usaha krecek Salome. Desa Ngadikerso merupakan daerah dengan fokus pengembangan pada sektor pertanian terutama agroindustri berbasis potensi lokal. Salah satunya yaitu kerupuk krecek salome yang berbahan dasar singkong" ujar Ragil Tri Indrawati ST MT kepada pers di kampus Polines, Sabtu (29/10).

Sayangnya, pengelolaan usaha Krecek Salome masih dilakukan secara konvensional tanpa bantuan Teknologi Tepat Guna (TTG) maupun teknologi lainnya, baik dari aspek produksi maupun manajemen. Hal ini membuat produktivitas, kualitas maupun kuantitas menjadi kurang optimal.

Kegiatan pengabdian Polines berfokus untuk membantu mitra dalam mengatasi permasalahan pada aspek produksi, manajemen pemasaran serta manajemen mutu & Kesehatan.

Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan skema Penerapan Iptek Masyarakat (PIM) yang didanai oleh Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022.

Program ini bertujuan untuk memajukan daya produksi UKM maupun Industri Rumah Tangga di sejumlah daerah dari pengelolaan dengan cara konvensional menuju kearah yang lebih modern menggunakan bantuan teknologi.

Keseluruhan rangkaian kegiatan dilaksanakan dari bulan Juni hingga bulan November 2022. Rentang waktu tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk UKM maupun Industri Rumah Tangga. Dalam bidang manajemen mutu dan kesehatan, tim pengabdi membuatkan ruang produksi dengan luas 18 m2 yang dapat digunakan sebagai tempat produksi.

Dalam bidang produksi memberikan TTG dan pelatihan penggunaan mesin pencetak adonan dengan kapasitas 60 kg/jam. **(Sgi)**

KR-Istimewa

Ragil (3 dari kiri) menyerahkan bantuan hasil pengabdian kepada pemilik Usaha Krecek Salome, Misyanto (2 dari kiri).

Kelurahan Semanggi Mampu Turunkan Stunting 19 Persen Setahun

SOLO (KR) - Anggota Komisi IX DPR-RI Rahmad Handoyo memberi pujian kepada satuan tugas percepatan penurunan stunting di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, karena mampu menurunkan prevalensi stunting hingga 18 persen dalam jangka waktu satu tahun. Berdasarkan data elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) Kelurahan Semanggi berhasil menurunkan angka stunting dari angka 18,57 persen menjadi 0,17 persen.

"Luar biasa, stunting turun 18 persen dalam setahun. Saya sangat apresiasi terhadap capaian dari Kelurahan Semanggi, saya kira ini bisa menjadi role model untuk keseluruhan, kalau Semanggi bisa, yang lain pasti juga bisa," kata Rahmad Handoyo dalam kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Bersama Mitra Kerja yang digelar BKKBN Jateng di Balai Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Kamis (27/10).

Setelah berdiskusi dengan Lurah Semanggi Aris Suharto, Rahmad membeberkan bahwa rahasia Kelurahan Semanggi atasi stunting ternyata sederhana. "Kuncinya, kerja keroyokan, lurahnya kerja mendampingi, perangkat desa juga mendampingi, dan adanya peran penting Tim Pendamping Keluarga, beserta ketua RT/RW" tambah Pemilik akun youtube Rahmad Handoyo Official itu. Rahmad menekankan bahwa keinginan Presiden Jokowi untuk menurunkan angka stunting Indonesia menjadi 14% itu tidaklah sulit, jika yang diterapkan di Semanggi bisa diaplikasikan di daerah lainnya.

Selamat kepada pak Lurah dan bu Pur, saya sangat surprise, mohon dipertahankan bahagia yang tak henti-hentinya memberi apresiasi dan berterima kasih kepada lurah Semanggi dan Kepala DP3AP2KB Kota Surakarta atas pencapaian tersebut. Senada dengan Rahmad Handoyo, Direktur Komunikasi, Informasi dan Edukasi BKKBN Eka Sulistia Ediningsih mengingatkan kepada warga Semanggi agar tetap berupaya menurunkan angka stunting hingga zero stunting khususnya, dan kota Surakarta pada umumnya.

"Salah satunya dengan mempertahankan program Sultan Nikah Capingan atau Konsultasi Nikah Calon Pinanganten (Konsultasi Pernikahan bagi Calon Pengantin) yang menjadi program unggulan di Kota Surakarta ini," katanya. Karena itu Eka mengajak warga Semanggi untuk memanfaatkan media sosial sebagai penggali dan penyalur informasi tentang upaya penurunan stunting.

Kepala DP3AP2KB Kota Surakarta Purwanti menyampaikan bahwa Pemerintah Surakarta sudah mengeluarkan Surat Edaran Walikota tertanggal 26 Oktober 2022 yang ditujukan kepada kelurahan agar meminta ketua RT/-RW untuk mendaftarkan calon pengantin 90 hari sebelum menikah serta menggalakkan gerakan minum susu dua gelas dan satu butir telur goreng setiap hari untuk kelompok berisiko stunting. Purwanti mengatakan bahwa meskipun penurunan stunting di Semanggi signifikan, namun masih ada sekitar 135 calon pengantin yang berisiko stunting dari 245 calon pengantin yang didampingi oleh tim pendamping keluarga (TPK). **(Ati)**

DPRD KABUPATEN KLATEN

SIKAPI ISU RESESI GLOBAL

DPRD Klaten Perjuangkan UMKM di APBD

G20 INDONESIA 2022

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten sigap menyikapi berkembangnya isu resesi global di tahun 2023. Para pimpinan DPRD bergerak cepat, melakukan koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), untuk mendorong UMKM lokal bisa menyerap anggaran APBD. Hal ini disebabkan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah.

Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Wakil Ketua Haryanto, dan Marjuki, pekan kemarin ke Jakarta menemui Kepala Lembaga Pengadaan barang/jasa Pemerintah Hendrar Prihadi. Wakil Ketua, Triyono, tidak bisa ikut serta karena ada tugas lain.

Pimpinan DPRD Klaten ditemui Kepala LKPP.

"DPRD Klaten ke LKPP, dalam rangka membantu Pemerintah Kabupaten Klaten, karena ada isu resesi global di tahun 2023. Kami berinisiatif koordinasi dengan LKPP. Mendorong bagaimana caranya ke depan UMKM bisa "masuk" di APBD, sehingga dalam rangka pengadaan barang tidak harus produk SNI, tidak harus yang brand besar," kata Hamenang Wajar Ismoyo.

Para pimpinan dewan tersebut mengatakan, LKPP dengan kepemimpinan baru, Hendrar Prihadi, luar biasa. Mereka sudah menyiapkan beberapa program dan aplikasi yang nantinya UMKM bisa "masuk" APBD tanpa harus membuat CV. UMKM tidak perlu terlalu ribet lagi dalam persyaratan untuk bisa meraih anggaran APBD. UMKM Cukup membuat NIB (nomor induk ijin berusaha) dan kelengkapan ringan lainya. Kemudahan persyaratan itu, diharapkan memudahkan UMKM. Misal kuliner, snack makan minum untuk rapat-rapat, dan pengadaan kursi cukup menggunakan mebel lokal, tidak harus SNI.

"Mereka sudah membuat aplikasi, pertama toko daring dimana semua produk baik UMKM maupun non UMKM bisa masuk di situ, sehingga langsung pengadaan bisa klik. Selain itu, juga ada katalog elektronik (e- katalog) lokal. Kita dorong katalog lokal ini, sehingga APBD bisa terserap lebih banyak ke UMKM," jelas para pimpinan DPRD Klaten.

Setelah mendapat penjelasan dari LKPP, DPRD Klaten merencanakan saat reses nanti anggota DPRD Klaten akan diminta untuk menyosialisasikan kepada UMKM di wilayah masing-masing. UMKM diberitahu agar segera bergabung di e-katalog lokal, sehingga pada pengadaan-pengadaan barang/jasa berikutnya, mereka sudah bisa menyerap anggaran APBD.

"Semua aplikasi dari LKPP, kita hanya bisa inputing di e-katalog lokal. Katalog lokal ini bisa memperoteksi, minimal UMKM lokal kita bisa lebih dulu masuk di APBD," jelas para pimpinan DPRD Klaten.

Ketua dan para wakil ketua DPRD Klaten juga menjelaskan, potensi APBD yang bisa diambil UMKM tidak terbatas jumlahnya, tergantung bagaimana UMKM melihat peluangnya. "Dari yang terkecil misal snack makan, pasti semua OPD dan semua instansi ada. Pengadaan mebeler, kita kana banyak industri mebel. Pengadaan baju seragam, kan Klaten ini surganya kain, tak perlu yang harus ijin nasional skala besar industrinya, yang kecil-kecil UMKM bisa masuk sendiri," jelas Hamenang.

Tahapan yang akan dilakukan DPRD Klaten untuk memperkuat ekonomi daerah menyikapi jika terjadi resesi global adalah, memperjuangkan UMKM agar bisa masuk ke APBD. Mendorong UMKM masuk ke e-katalog. Langkah berikutnya, mendorong semua organisasi perangkat daerah (OPD) Klaten untuk membeli produk-produk UMKM Klaten yang sudah masuk di e-katalog, sehingga aman secara administrasi oleh BPK dan lainya.

Selain itu, DPRD Klaten akan koordinasi dengan Bupati dan BKD agar mendorong OPD untuk menggunakan produk UMKM lokal. "Kalau UMKM lokal kita ada, jangan ambil yang lain. Insya Allah harga juga bersaing. Misal lebih mahal sedikit ya kita makhlumi. UMKM kan memang produk masih kecil, jadi biaya produksinya lebih besar. Sepanjang itu sudah masuk di e katalog boleh. Kalau bicara yang paling murah, pasti yang menang industri besar, karean biaya produksi mereka bisa ditekan sangat rendah. LKPP siap sewaktu-waktu diundang sosialisasi di Klaten baik ke UMKM maupun ke OPD," jelas Hamenang dan para wakil ketua.

Tulisan dan Foto : Sri Warsiti

Pimpinan DPRD saat koordinasi dengan LKPP

Pimpinan DPRD mendengarkan penjelasan dari LKPP.